

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2023 -2026 dan antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dari Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan dan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Liwa, 2022
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Barat,

PAIJO, S.KM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640902 198803 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2.	Sumberdaya.....	10
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	13
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
3.2.	Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN.....	24
4.1.	Tujuan	24
4.2.	Sasaran.....	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
5.1.	Strategi	24
5.2.	Arah Kebijakan	24
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII	PENUTUP	31
Lampiran I	POHON KINERJA	
Lampiran II	CASCADING	
Lampiran III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain dengan melakukan *review* terhadap struktur kelembagaan, reorientasi terhadap

program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi maupun nasional.

Menurut Friedman (1993) perencanaan merupakan penghubung antara teori dan tindakan. Perencanaan dianggap sebagai cara profesional yang menghubungkan dunia ilmiah dengan tindakan nyata dalam ranah publik. Perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Balitbang Kabupaten Lampung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Balitbang merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh Balitbang Kabupaten Lampung Barat adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 - 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;

18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud di susunnya dokumen Renstra adalah sebagai pedoman dan acuan perencanaan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk penyusunan dan penetapan rencana lima tahunan, rencana kerja tahunan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tahunan dalam kurun waktu 2023 - 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen Renstra Balitbang Kabupaten Lampung Barat 2023 – 2026 yang menjadi rencana kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026;
- c. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 2.2. SUMBERDAYA
- 2.3. KINERJA PELAYANAN

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

4.2. SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. STRATEGI

4.2. ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 77 Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengembangan dengan fungsinya adalah :

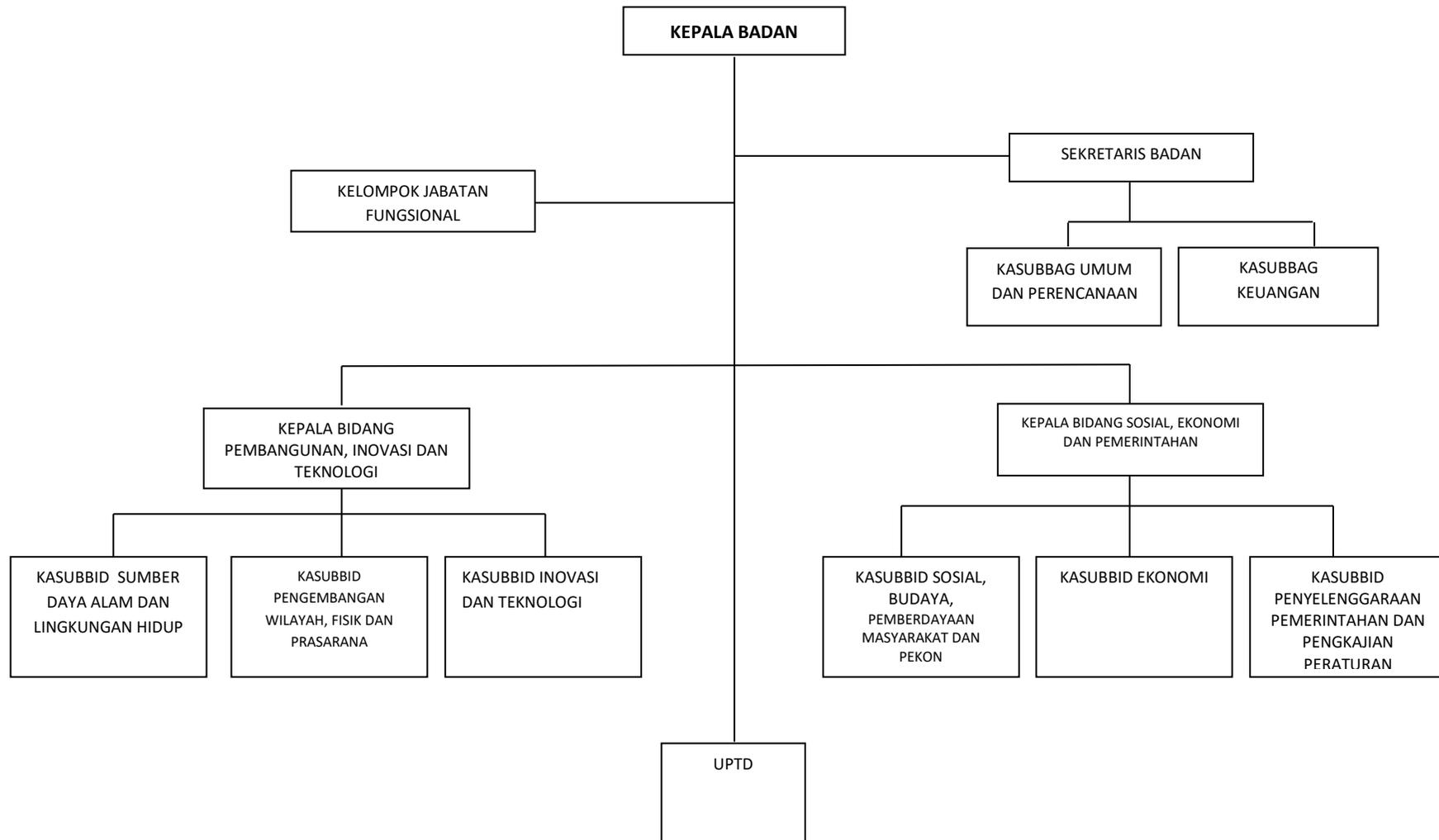
- a. Penyusunan kebijakan teknis kelitbangan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran kelitbangan;
- c. Pelaksanaan kelitbangan;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan;
- h. Pelaksanaan administrasi kelitbangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sedangkan susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat (Gambar 2.1) sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan

- 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- d. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi; dan
 - 3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Sebagaimana gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur di Badan Penelitian dan pengembangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

- Tugas

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- Pelayanan administrasi; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Badan;

b. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

- Tugas

Bidang pembangunan, inovasi dan teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi; dan

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

- Tugas

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan serta diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan rumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;
- penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;

2.2. SUMBERDAYA

1.2.1. Kepegawaian

Sumberdaya Manusia merupakan komponen penting dalam suatu organisasi. Berdasarkan struktur organisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki 12 Jabatan Struktural, yaitu :

- 1 (satu) orang Kepala, Esselon II.a
- 1 (satu) orang Sekretaris, Esselon III
- 2 (dua) orang Kepala Bidang, Esselon III
- 8 (delapan) orang Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang, Esselon IV.a

Berdasarkan Jenjang Pendidikan, pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan terlihat seperti dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6
2.	S1	8
3.	Diploma	2
4.	SMA	3
5	SMP	1

Sedangkan berdasarkan Golongan, Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan terlihat seperti dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
 SDM Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV.c	1
2.	IV.b	2
3.	IV.a	3
4.	III.d	2
5.	III.c	4
6.	III.b	1
7.	III.a	2
8.	II.c	3
9.	II.b	1
10.	I.c	1

1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti Gedung Kantor, Kendaraan Dinas, dan sarana pendukung lainnya. Secara umum daftar sarana dan prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan terlihat sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Gedung kantor permanen	1 unit	baik
2.	Minibus	2 unit	baik
3.	Kursi	69 unit	35 unit dalam kondisi rusak
4.	Meja	51 unit	23 unit dalam kondisi rusak
5.	Filing Cabinet	5 unit	4 unit dalam kondisi rusak
6.	Lemari Arsip	5 unit	1 unit dalam kondisi rusak
7.	Alat penghancur kertas	1 unit	baik
8.	Brankas	1 unit	baik
9.	Camera Electronic	2 unit	rusak
10	Kompas geologi	1 unit	baik
11	Laptop	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
12	PC Unit	9 unit	2 unit dalam kondisi baik
13	Printer	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
14	Scanner	1 unit	baik
15	Plotter	1 unit	baik
16	Rol Meter	1 unit	baik

Selain asset diatas, ada asset yang tidak berwujud berupa website kelitbangan.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Perangkat Daerah se- Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat, Perguruan Tinggi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;

- d. Perekayasaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan
- g. Evaluasi kebijakan.

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Perangkat Daerah se- Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat, Perguruan Tinggi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- c. Kelitbangan Utama;
- d. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- h. Penelitian;
- i. Pengkajian;
- j. Pengembangan;
- k. Perekayasaan;
- l. Penerapan;
- m. Pengoperasian; dan
- n. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. Fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. Supervise dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 - 2022 ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

- a. Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
- b. Indeks Inovasi Daerah

Dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah				6	10	12	12	12	6	10	16	12	proses pelaksanaan	100	100	133	100	
2	Indeks Inovasi Daerah				Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	proses pelaksanaan	100	100	100	100	

Dengan realisasi anggaran terlihat seperti dalam Tabel 2.5 sebagai mana berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam 1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam 1.000)					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	681.153	772.944	603.548	2.333.657	2.371.709	610.288	720.018	578.905	2.167.421	proses	90	93	96	93			
Program Penelitian dan Pengembangan	856.340	1.515.988	641.700	888.923	861.452	650.075	1.503.920	635.690	884.313	proses	76	99	99	99			
Program Pengembangan Kebun Raya	1.505.067	1.480.015	870.162	-	-	1.428.525	1.384.128	865.654	-		95	94	99				

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Lampung Barat merupakan daerah hulu Provinsi Lampung, dengan luas wilayah hutan sekitar 59,25% (126.956,27 hektar) dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Barat. Terdiri dari Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sementara itu, kawasan budidaya hanya sekitar 40,75% (87.318,28 hektar). Dengan adanya pertumbuhan penduduk serta aktifitas ekonomi masyarakat, hal ini menimbulkan berbagai dampak berupa dampak ekonomi, sosial dan ekologi di Kabupaten Lampung Barat. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan kajian-kajian sebagai dasar perumusan dan kebijakan pembangunan Kab. Lampung Barat kedepan.

Selain perlunya kajian, juga diperlukan inovasi-inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan seperti pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk komitmen Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

Berdasarkan hal diatas, ada beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Hasil Penelitian dan Pengembangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan
- SDM Balitbang masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas (belum memiliki fungsional peneliti) serta belum memiliki dewan riset
- Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, namun kelembagaan yang menaungi belum memadai sarana dan prasarana pendukungnya
- Kompleknya permasalahan di Kabupaten Lampung Barat baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi yang memerlukan penelitian dan pengembangan
- Rendahnya implementasi hasil penelitian di tingkat lapangan
- Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna
- Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dinilai belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh OPD lain

b. Peluang

- Ditetapkannya Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD.
- Kesadaran perlunya Litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan pengembangan potensi daerah
- Kerjasama di Bidang penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian dan Pengembangan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Tugas dan Fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat memiliki peranan penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, hal ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh Sumberdaya yang memadai. Berdasarkan capaian kinerja selama lima tahun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan tupoksi nya. Permasalahan itu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Hasil Penelitian dan Pengembangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dinilai belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh OPD lain
- c. Belum tersediannya Rencana Induk Kelitbangan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penelitian;
- d. Pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran baik secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana Balitbang dalam menjalankan tupoksi
- f. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Balitbang di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah
- g. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerapan/pemanfaatan hasil riset
- h. Belum optimalnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK
- i. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan.

1.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Badan Litbang. Telaah terhadap faktor internal, memberikan gambaran tentang potensi dan hambatan pelayanan SKPD, sedangkan telaah terhadap faktor eksternal memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman bagi SKPD untuk 5(lima) tahun mendatang.

a. Faktor Internal

1. Potensi (S)

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD.
- Tersedianya struktur organisasi Litbang yang jelas
- Tersedianya sumberdaya aparatur

2. Kelemahan (W)

- Sarana dan prasarana belum memadai
- Pendanaan belum memadai
- Sumberdaya aparatur belum memadai
- Tenaga fungsional masih terbatas
- Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan baru berjalan dari tahun 2017 ini.
- Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasilpenelitian/kajian;
- Belum adanya Dewan Riset Daerah

b. Faktor Eksternal

1. Peluang (O)

- Perkembangan IPTEK yang semakin maju
- Kesadaran perlunya Badan Litbang di Daerah
- Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi

2. Tantangan (T)

- Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif
- Kompleknya permasalahan yang harus diselesaikan di Lampung Barat

- Kondisi Lampung Barat yang luas wilayahnya 61,5% adalah kawasan hutan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan bidang Penelitian dan Pengembangan
- Kebijakan pembangunan masih dipengaruhi oleh dinamika politik.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor – faktor ini dibuat matriks untuk menganalisa isu-isu strategi. Lebih rinci, matriks perumusan isu-isu strategi disajikan dalam Tabel 3.1

TABEL 3.1 MATRIKS PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGI

Faktor Internal	Potensi (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD. 2. Tersedianya struktur organisasi Litbang yang jelas 3. Tersedianya sumberdaya aparatur	1. Sarana dan prasarana belum memadai 2. Pendanaan belum memadai 3. Sumberdaya aparatur belum memadai 4. Fungsional peneliti masih terbatas 5. Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan baru berjalan tahun 2017 ini. 6. Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasilpenelitian/kajian; 7. Belum adanya Dewan Riset Daerah
	Peluang (O)	Strategi S-O
1. Perkembangan IPTEK yang semakin maju 2. Kesadaran perlunya Badan Litbang di Daerah 3. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi	1. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Tantangan (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif 2. Kompleknya permasalahan yang harus diselesaikan di Lampung Barat baik dari masalah sosial, ekonomi, ekologi 3. Kondisi Lampung Barat yang luas wilayahnya 61,5% adalah kawasan hutan. 4. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan bidang Penelitian dan Pengembangan 5. Kebijakan pembangunan masih dipengaruhi oleh dinamika politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah 2. Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga baik di daerah maupun pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan 3. Pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk dukungan Pemda untuk program konservasi kawasan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK 2. Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah

Dari matriks diatas, didapat 7 (tujuh) isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
3. Peningkatan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah;
4. Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga baik di daerah maupun pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan;
5. Pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk inovasi dukungan Pemda dalam melaksanakan program konservasi kawasan hutan;
6. Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
7. Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Litbang Kabupaten Lampung Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5(lima) tahun kedepan terlihat dalam Tabel 4.1.

TABEL 4.1
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif/ 61	Sangat Inovatif/ 62	Sangat Inovatif/ 63	Sangat Inovatif/ 64	-
		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	25	50	75	100	-
			Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	28	28	28	28	-

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran yang efektif. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program undikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut, tersaji dalam Tabel 5.1.

TABEL 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			
SASARAN RPD : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi Kelitbangan • Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah • Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah • Peningkatan kerjasama kelitbangan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana, program dan kegiatan serta pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan terlihat seperti dalam Lampiran 1.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan, secara rinci dapat dijelaskan detail subkegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
 Detail Subkegiatan Tahun 2022 – 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Detail Khusus Sub kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan 11 dokumen yaitu renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 8 dokumen yaitu Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 11 dokumen yaitu renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 8 dokumen yaitu Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen

5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen			
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA 1 dokumen			
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen			
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan keuangan akhir	Penyusunan Laporan keuangan	Penyusunan Laporan keuangan	Penyusunan Laporan keuangan

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	tahun 1 dokumen	akhir tahun 1 dokumen	akhir tahun 1 dokumen	akhir tahun 1 dokumen
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan
5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan RKBMD 1 dokumen			
5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang			

5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis	Barang cetakan dan penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis	Barang cetakan dan penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis	Barang cetakan dan penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU			
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang			
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja rapat 10 unit dan kursi rapat 20 unit	Pengadaan Lemari Arsip 4 unit	Pengadaan Sofa 1 set, kursi lipat 10 unit	Pengadaan Kursi biro 2 unit, kursi ½ biro 8 unit
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan untuk ruang rapat 3 unit (webcam, TV	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit

		Led, Speaker basstone)			
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit

5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan				
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang terkait kelembagaan dan tatalaksana daerah 2 laporan	-
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang terkait aparatur dan Reformasi Birokrasi Pemda Kab. Lampung Barat 2 laporan	-	-
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan

	Reformasi Birokrasi				
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	Rumusan rekomendasi atas penetapan peraturan daerah terkait geopark 1 laporan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	-	Litbang berupa kajian terkait gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 dokumen	-	-
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Litbang berupa kajian terkait warisan budaya tak benda 1 dokumen	-	-	-
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	Litbang berupa kajian terkait stunting pada anak 1 dokumen	-
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	Litbang berupa kajian terkait bonus demografi 1 dokumen
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Litbang berupa kajian terkait Peran Koperasi dalam mendukung permodalan	-	-

			UKM 1 dokumen		
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Litbang berupa kajian terkait Peningkatan PDRB Kabupaten Lampung Barat 1 dokumen	-	-	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Litbang berupa kajian terkait Integrasi Ternak kambing dengan kopi 1 dokumen	-	Litbang berupa kajian terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 1 dokumen dan terkait peningkatan PDRB sector pertanian 1 dokumen	-
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait teknologi budidaya ikan tawar yang bernilai ekonomis 1 dokumen
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	Litbang berupa Kajian terkait Implementasi pelaksanaan KLHS di Kab. Lampung Barat 1 dokumen	-	-
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait kemitraan konservasi dengan masyarakat 1 dokumen
5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Litbang berupa pengembangan pengelolaan geopark Suoh 1 dokumen	-	-	-

5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	Litbang berupa Kajian terkait model pengelolaan sumberdaya air baik air permukaan maupun air tanah di Kab. Lampung Barat 1 dokumen	-	-
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait penataan sistem drainase kota Liwa 1 dokumen
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	Litbang berupa Kajian terkait Implementasi pelaksanaan RTRW di Kab. Lampung Barat 1 dokumen	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun) dan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun) dan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun) dan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun) dan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD periode 2023 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	
1	Nilai SAKIP OPD	79,18 poin	79,25	79,50	79,75	80	80
2	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	80 laporan	22	24	24	24	94

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 — 2026 merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2023 - 2026. Rencana Strategis ini perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan pengembangan, serta hambatan yang ditemukan apabila tidak tercapainya sasaran akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

Akhirnya semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah Inovatif	Sangat Inovatif	61 predikat/poin	62 predikat/poin	63 predikat/poin	64 predikat/poin	65 predikat/poin	66 predikat/poin	67 predikat/poin	68 predikat/poin	69 predikat/poin	70 predikat/poin				
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	- persen 0 Perangkat Daerah	25 persen 28 Perangkat Daerah	50 persen 28 Perangkat Daerah	75 persen 28 Perangkat Daerah	100 persen 28 Perangkat Daerah	0 persen 0 Perangkat Daerah	100 persen 112 Perangkat Daerah								
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	0 Laporan	22 Laporan	0	24 Laporan	0	24 Laporan	0	24 Laporan	0	0 Laporan	0	94 Laporan	0		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	0 laporan	16 laporan	370,903,000	18 laporan	425,493,300	18 laporan	461,493,300	18 laporan	511,993,300	0 laporan	0	70 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	1 dokumen	250,000,000	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 dokumen	3 dokumen	700,000,000	3 dokumen	720,000,000	3 dokumen	740,000,000	3 dokumen	760,000,000	0 dokumen	0	12 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	0 laporan	4 laporan	315,000,000	4 laporan	315,000,000	4 laporan	315,000,000	4 laporan	315,000,000	0 laporan	0	16 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	0 %	79,25 %	0	79,50 %	0	79,75 %	0	80,00 %	0	0 %	0	80,00 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	11 dokumen	23,400,000	8 dokumen	18,900,000	11 dokumen	23,400,000	8 dokumen	18,900,000	0 dokumen	0	38 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	0 dokumen	5 dokumen	0	5 dokumen	0	5 dokumen	0	5 dokumen	0	0 dokumen	0	20 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen	0	12 dokumen	0	12 dokumen	0	0 dokumen	0	48 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/bulan	20 orang/bulan	1,934,842,500	20 orang/bulan	1,934,842,500	20 orang/bulan	1,934,842,500	20 orang/bulan	1,934,842,500	0 orang/bulan	0	80 orang/bulan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 laporan	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	0 laporan	0	8 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 dokumen	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	0 dokumen	0	12 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	1 dokumen	26,000,000	1 dokumen	26,000,000	1 dokumen	26,000,000	1 dokumen	26,000,000	0 dokumen	0	4 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	5 orang	0	5 orang	0	5 orang	0	5 orang	0	0 orang	0	20 orang	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	1 paket	174,480,000	1 paket	188,385,000	1 paket	201,105,000	1 paket	211,105,000	0 paket	0	4 paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	0 paket	0	4 paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	4 dokumen	0	4 dokumen	0	4 dokumen	0	4 dokumen	0	0 dokumen	0	16 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 laporan	12 laporan	0	12 laporan	0	12 laporan	0	12 laporan	0	0 laporan	0	48 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	50 laporan	0	50 laporan	0	50 laporan	0	50 laporan	0	0 laporan	0	200 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 unit	13 unit	72,000,000	4 unit	45,000,000	6 unit	100,000,000	4 unit	55,000,000	0 unit	0	18 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	1 laporan	149,403,900	1 laporan	162,000,000	1 laporan	175,000,000	1 laporan	175,000,000	0 laporan	0	4 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	3 laporan	0	3 laporan	0	3 laporan	0	3 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0 unit	8 unit	109,680,000	8 unit	81,440,000	8 unit	83,440,000	8 unit	86,440,000	0 unit	0	32 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	